



TAHUN 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj - IP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Dumai
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun LKj-IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Dumai tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKj-IP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah untuk mendorong perangkat daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi, maka diuraikanlah ke dalam suatu program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 oleh Badan Kesbang dan Politik Kota Dumai. Kemudian untuk mengukur sejauhmana capaian indikator kinerja sasaran, kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, serta target, realisasi dan kebijakan di tahun 2022, maka dilakukan melalui Evaluasi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran serta Realisasi APBD pada Tahun Anggaran 2022.

Dengan mengetahui capaian kinerja, capaian anggaran serta tingkat keberhasilan dan kegagalan baik pada tahun ini maupun tahun yang lalu, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi Pimpinan dan seluruh staf untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Badan Kesbangpol Kota Dumai di tahun-tahun yang akan datang.

Dumai, Januari 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA DUMAI,

EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660602 199003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKj-IP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2022 ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah untuk mendorong perangkat daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi, maka diuraikanlah ke dalam suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 oleh Badan Kesbang dan Politik Kota Dumai. Kemudian untuk mengukur sejauhmana capaian indikator kinerja sasaran, kinerja program dan kegiatan, serta target, realisasi dan kebijakan di tahun 2022, maka dilakukan melalui Evaluasi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran serta Realisasi APBD pada Tahun Anggaran 2022.

Dengan mengetahui capaian kinerja, capaian anggaran serta tingkat keberhasilan dan kegagalan baik pada tahun ini maupun tahun yang lalu, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi Pimpinan dan seluruh staf untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Badan Kesbangpol Kota Dumai di tahun-tahun yang akan datang.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain terbatasnya kompetensi dan kualifikasi staf / SDM untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya sarana dan prasarana dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran. Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya- upaya yang dilakukan adalah :

1. Penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan Kualifikasi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pemenuhan Kebutuhan SDM dan sarana prasarana kerja yang memadai, terutama gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik.
3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai.
4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, dan data data lain yang berhubungan dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Strategis	3
D. Struktur Organisasi	3
E. Dasar Hukum	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2021-2026.

Pembangunan wawasan kebangsaan yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberikan kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesatuan bangsa yang semakin erat. Sasaran utama program pembangunan bidang kesatuan bangsa adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan.

Rangkaian program/kegiatan/subkegiatan pada Tahun 2022 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2021-2026 Pemerintah Kota Dumai, dan diakumulasikan dalam beberapa program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam Pembangunan tahun 2022, yaitu :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATANPENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan berbagai kebijakan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai yang diarahkan antara lain kepada upaya-upaya untuk :

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
3. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

B. Maksud dan Tujuan

LKj-IP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2021-2026 khususnya pada tahun rencana 2022. LKj-IP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2022 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Terkait dengan hal tersebut, LKj-IP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun anggaran 2022. Selain itu LKj-IP tahun 2022 bertujuan pula

untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2021-2026.

C. Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai merupakan masalah yang tidak terlepas dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang tidak terlepas dari berbagai faktor sehingga pemecahannya harus secara strategis melibatkan sektor terkait dalam menunjukkan kerjasama dalam pembangunan kemananan dan kenyamanan lingkungan sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal.

Isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kerjasama, pengawasan dan pembinaan dalam bidang kewaspadaan dini masyarakat, pengawasan orang asing dan lembaga asing dan ketahanan agama dan kepercayaan serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
2. Kurangnya koordinasi, pembinaan dan pelayanan serta pengendalian politik dalam negeri dan kelembagaan politik pemerintahan.

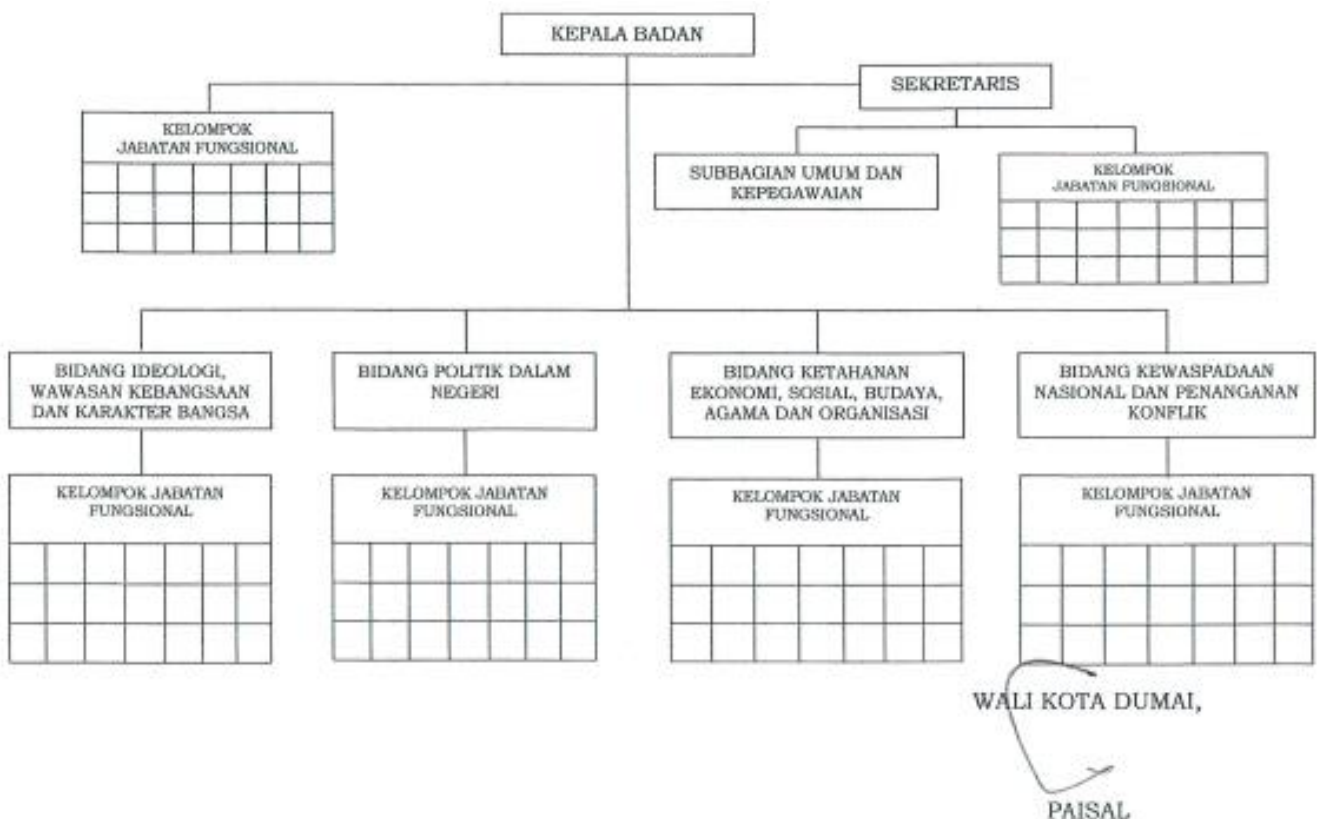
D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 51 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai terdiri dari :

- ❖ Kepala Badan
- ❖ Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Program dan Anggaran;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

- ❖ Bidang Ideologi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- ❖ Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- ❖ Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- ❖ Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2022**



E. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi dari Walikota dan Wakil Walikota Dumai sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”***.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industry;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu;
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai mendukung pencapaian Misi 4 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan ditopang dengan peningkatan partisipasi elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dalam wujud partisipasi dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagai pihak yang melakukan *social control* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Misi ini untuk mencapai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang ditandai dengan tercapainya beberapa kondisi berikut:

1. Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima;
3. Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal;
4. Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi, komitmen, kebanggaan);
5. Meningkatkan pengelolaan asset daerah;
6. Optimalisasi pendapatan daerah;
7. Optimalisasi BUMD sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Meningkatkan akses masyarakat pada Sistem Informasi manajemen daerah;
9. Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

B. Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Kita tentu sepaham bahwa memerangi korupsi yang sudah sistematis dan mengakar haruslah dengan melakukan tindakan-tindakan sistematis dan luar biasa dan tidak hanya cukup dengan tindakantindakan represif saja. Perubahan-perubahan mendasar perlu dilakukan terhadap sistem manajemen pemerintahan guna tercapainya kondisi negara yang lebih baik dan lebih bersih.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat laporan pelaksanaan pengukuran suatu capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2022, tentunya harus terlebih dahulu disusun pula suatu penetapan kinerjanya. Penetapan Kinerja merupakan fokus yang akan diupayakan oleh seluruh jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai. Fokus perhatian utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai adalah mewujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah penyempurnaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sebagai salah satu OPD yang menjalankan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2021
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	%	85
		Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	%	90

Sasaran 1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	119,620,000
		1.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	119,620,000
		1.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	8,820,000
		1.1.2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	110,800,000

2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 2,354,469,400
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 2,354,469,400
2.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 2.380.376.866
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 11,860,000
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 45,216,000
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 45,216,000
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 30,880,000

3.1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.	14,336,000
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp.	445,212,000
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.	445,212,000
4.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.	107,530,000
4.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.	337,682,000
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp.	980,301,500
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	980,301,500
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	107,132,600

5.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	59,172,000
5.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	13,996,900
5.1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	800,000,000
	Jumlah	Rp.	3,944,818,900

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target dan realisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	%	85%	85%	100%
		Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	%	90%	90%	100%

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Pengukuran Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai
Tahun 2022

No	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap RPJMD 2026 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	-	85%	85%	100%	100%	85%
2.	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	-	90%	90%	100%	100%	90%

Dari Tabel Pengukuran Kinerja OPD Tahun 2022 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024

Target tahun 2022 Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 adalah 85%, capaian tahun 2022 adalah 85% atau sebesar 100%.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri

Target tahun 2022 Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri adalah 90%, capaian tahun 2022 adalah 90% atau sebesar 100%.

A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021)

a. Indikator Kinerja Sasaran :

Target tahun 2021, Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial adalah sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 adalah 85%.

b. Indikator Kinerja Sasaran :

Target tahun 2021, Persentase laporan gangguan kamtibmas yang ditindaklanjuti dan pelaksanaan kegiatan politik daerah di Kota Dumai adalah sebesar 90%, sedangkan pada tahun 2022 Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri adalah 90%.

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

A.4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan:

- Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 pada tahun 2022 yang ingin dicapai sebanding dengan realisasi kinerja pada tahun 2022,
- Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri pada tahun 2022 yang ingin dicapai sebanding dengan realisasi kinerja pada tahun 2022.

Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

a. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 119.620.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 119.590.000,00 atau 99,97%.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 119.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 119.590.000,00 atau 99,97% melalui sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan kegiatan dengan target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan atau 100%, komponen kegiatan ini adalah tentang wawasan kebangsaan;
- Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan kegiatan dengan target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan atau 100%, Komponen kegiatan ini adalah tentang belanja hibah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

b. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 2.354.469.400,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 2.352.277.464,00 atau 99,91%.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 2.354.469.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.352.277.464,00 atau 99,91% melalui sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan kegiatan dengan target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan atau 100%, Komponen kegiatan ini adalah tentang belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan kegiatan dengan target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan atau 100%, Komponen kegiatan ini adalah tentang Monitoring dan Evaluasi Partai Politik di Kota Dumai.

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 45.216.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 41.336.000,00 atau 91,42%.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pendidikan politik masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 45.216.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 41.336.000,00 atau 91,42% melalui sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan kegiatan dengan target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan atau 100%, Komponen kegiatan ini adalah tentang rapat koordinasi ormas dan penyusunan Tata Naskah Akademik rancangan Perda ormas;
- Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan kegiatan dengan target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan atau 100%, Komponen kegiatan ini adalah tentang Monitoring dan Evaluasi Ormas.

d. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 445.212.000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 444.857.000,00 atau 99,92%.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial, dan Budaya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 445.212.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 444.857.000,00 atau 99,92% melalui sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan kegiatan dengan target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan atau 100%, Komponen kegiatan ini adalah tentang Rapat Koordinasi dan Belanja Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ;
- Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan kegiatan dengan target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan atau 100%, Komponen kegiatan ini adalah tentang Rapat Koordinasi dan Belanja Hibah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai.

e. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 980.301.500,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 790.574.225,00 atau 80,65%.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 980.301.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 790.574.225,00 atau 80,65% melalui sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah rakor di Bidang Penanganan Konflik di Daerah dengan target 4 kali dan terealisasi 4 kali atau 100%, Komponen kegiatan ini adalah tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik di daerah;
- Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah rakor di Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dengan target 3 kali dan terealisasi 3 kali atau 100%, Komponen kegiatan ini adalah tentang Rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Hibah FKDM;
- Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah rakor di Bidang Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing dengan target 3 kali dan terealisasi 3 kali atau 100%, Komponen kegiatan ini adalah tentang Rapat koordinasi Timpora;

- Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai dengan target 8 kali dan terealisasi 8 kali atau 100%, Komponen kegiatan ini adalah tentang Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai.

a. Realisasi Anggaran

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap program rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun Anggaran 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp 3.944.818.900,00 dari jumlah anggaran Rp 3,748,634,689,00 atau 94,37% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Gambaran Pengukuran kinerja Tahunan dan Evaluasi Berkala Triwulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel Pengukuran Kinerja Tahunan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target Tahunan	Realisasi Tahunan	% Capaian		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	%	85%	85%	100%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	119.620.000	119.590.000	99,97%
		Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	%	90%	90%	100%	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.354.469.400	2.352.277.464	99,91%
							Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	45.216.000	41.336.000	91,42%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target Tahunan	Realisasi Tahunan	% Capaian		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	445.212.000	444.857.000	99,92%
							Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	980.301.500	790.574.225	80,65%
					Rata-rata capaian	100%			Rata-rata capaian	94,37%

Tabel Evaluasi Berkala Triwulan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Aksi					Realisasi 2021					% Capaian
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Tahunan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Realisasi Tahunan	
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=4+5+6+7$	10	11	12	13	$14=10+11+12+13$	15
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	%	22	44	66	85	85%	22	44	66	85	85%	100%
		Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	%	20	40	60	90	90%	20	40	60	90	90%	100%
													Rata-rata capaian	100%

BAB IV

PENUTUP

Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang dicapai sepanjang tahun 2022 adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam upaya meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah. Salain itu walaupun secara kuantitas masih terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2022.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2022 merupakan tahun ke 1 (pertama) dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama, partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: Sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2022 yang melibatkan seluruh bidang/bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum indikator sasaran mencapai target yaitu 94,37%. Dan tentu saja tidak cukup puas dengan hasil yang diperoleh melainkan akan terus ditingkatkan dan dipertahankan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2022 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2022 dan juga sebagai uraian tentang pencapaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2022.

Dumai, Januari 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA DUMAI,

EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660602 199003 1 005